

JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

Implementasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Implementation of an Electronic-Based Planning System at the South Sulawesi Provincial Health Office

Andi Fatimah*, Frida Chairunisa, Wahyu Nurdiansyah

Politeknik STIA LAN Makassar, Makassar, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 20 Jul 2026

Revised: 11 Agu 2026

Accepted: 18 Agu 2026

ABSTRACT / ABSTRAK

The lack of integration between the Regional Government Information System (SIPD) and the South Sulawesi e-Planning application has resulted in repeated data entry and additional workload. This study aimed to analyze the implementation of an electronic-based planning system at the South Sulawesi Provincial Health Office. A descriptive qualitative approach was employed involving 11 informants selected purposively based on their involvement in planning processes, system use, and utilization of planning outputs. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Data validity was assessed through source and technique triangulation. The findings show that the system is perceived as useful and relatively easy to use, particularly for data processing, document preparation, coordination, and access to planning information. However, implementation has not been optimal because e-Planning Sulsel and SIPD are still used in parallel, resulting in repeated data entry and increased workload. Planning outputs, particularly the DPA, can be observed, understood, and utilized by parties involved in subsequent financial processes. The study concludes that strengthening interoperability between e-Planning Sulsel and SIPD is necessary to reduce duplicated work and improve the effectiveness of electronic planning implementation.

Keywords: *e-Planning, electronic planning, interoperability, SIPD, digital government*

Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan aplikasi e-Planning Sulsel menyebabkan penginputan data secara berulang dan menambah beban kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 11 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dalam proses perencanaan, penggunaan sistem, dan pemanfaatan output perencanaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dipersepsikan bermanfaat dan relatif mudah digunakan, terutama dalam pengolahan data, penyusunan dokumen, koordinasi, dan akses terhadap informasi perencanaan. Namun, implementasi belum optimal karena e-Planning Sulsel dan SIPD masih digunakan secara paralel sehingga terjadi penginputan data berulang dan peningkatan beban kerja. Output perencanaan, khususnya DPA, dapat diamati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat dalam proses keuangan selanjutnya. Disimpulkan bahwa penguatan interoperabilitas antara e-Planning Sulsel dan SIPD diperlukan untuk mengurangi pekerjaan ganda dan meningkatkan efektivitas implementasi sistem perencanaan elektronik.

Kata kunci : *e-Planning, integrasi sistem, perencanaan elektronik, SIPD, SPBE*

Corresponding Author:

Name : Andi Fatimah

Affiliate : Politeknik STIA LAN Makassar

Address : Jl. A. P. Pettarani No.61, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Email : fatimah.naela03@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era globalisasi mendorong birokrasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Triwahyuni & Fatmawati, 2024a). Di era modern ini pelayanan public menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi (Dwi Maharani & Ghulam Manar, 2020). Untuk mengoptimalkan fungsi manajemen pemerintah diperlukan program terpadu peningkatan kualitas sumber daya manusia, program perencanaan pembangunan, pelibatan masyarakat dalam perencanaan program dapat ditingkatkan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana di tingkatkan dan terprogram secara kontinue (Cita et al., 2020). Salah satu instrumen kunci dalam sistem perencanaan adalah Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik.

Di Indonesia, transformasi digital sektor publik menjadi agenda strategis nasional melalui penerapan e-government dan penguatan sistem informasi kesehatan (Marlindawati et al., 2026; (Wibowo, 2023) Pemerintah mendorong pengembangan bank data kesehatan yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas data, analisis, serta pemanfaatan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan mandat yang mengharuskan semua instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan sistem informasi pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelaraskan regulasi pusat dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 36 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan terpadu.

Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik tidak hanya mengubah cara pemerintah menyelenggarakan administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik (Wijaya & Saleh, 2025). Kendati demikian, berbagai literatur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor publik masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan (Maulidatul Hasanah, 2025), BPKAD Kabupaten Sampang lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pemerintah daerah karena masih kurangnya dalam proses penggunaan aplikasi, dan diberikan sumber daya lebih (Triwahyuni & Fatmawati, 2024a), hambatan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, keterampilan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Adanya pergeseran SDM (mutasi) menjadikan pegawai yang tadinya memiliki kemampuan karena pengalaman kerja digantikan oleh pegawai baru yang belum mempunyai kapasitas (Pada et al., 2021) Jamaluddin & Kholid Alfirdaus, 2022)

Research gap dari penelitian terdahulu belum ada penelitian kualitatif yang secara mendalam dan menyeluruh menginvestigasi implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan dalam konteks sinkronisasi antara SIPD (pusat) dengan e-Planning (provinsi), dalam hal ini, sebagai subsistem yang harus beradaptasi dan terintegrasi dengan modul perencanaan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Model TAM berfokus pada bagaimana pengguna melihat manfaat dan kemudahan sebuah teknologi, dan bagaimana hal ini memengaruhi keputusan mereka untuk

menggunakannya. Sementara itu, teori DOI menjelaskan proses adopsi inovasi di masyarakat, mulai dari pengenalan, komunikasi, hingga pengaruh dari lingkungan sosial (Gilang Arrauf Adhidarma et al., 2025)

Integrasi sistem lintas perangkat daerah menjadi konsep penting dalam keberhasilan SPBE (Khadija et al. 2024; (Berbasis et al., 2022). Aplikasi SRIKANDI dirancang untuk berjalan secara terstandar di semua OPD agar tercipta kesinambungan administrasi, interoperabilitas data, dan efisiensi dalam layanan internal (asmara siregar, ., and Septiawan 2024). Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan aplikasi masih timpang antar-OPD karena perbedaan kapasitas teknis, keterbatasan SDM, dan lemahnya koordinasi. Implementasi SPBE yang ideal membutuhkan satu ekosistem digital yang saling terhubung, tidak hanya antar sistem, tetapi juga antar pelaksana kebijakan (Purnamaningsih 2024). Keterpaduan ini menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan digital yang tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap efektivitas layanan dan reformasi birokrasi (Santos

Hambatan integrasi platform berdampak langsung pada penurunan efisiensi kerja dan tingkat penerimaan teknologi oleh para aparatur perencanaan. Untuk mengukur perilaku pengguna terhadap adopsi inovasi ini, penelitian ini menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM untuk meninjau variabel internal berupa kegunaan yang dipersepsikan (*perceived usefulness*) dan kemudahan yang dipersepsikan (*perceived ease of use*) serta teori *Diffusion of Innovation* (DOI) untuk mengukur dimensi eksternal inovasi yang meliputi keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas dan kemudahan diamati. Melalui kerangka pikir integrasi ini, penelitian bertujuan menganalisis hambatan implementasi Sistem perencanaan Elektronik serta dampak terhadap kelancaran penyusunan anggaran daerah.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan pada bulan Februari – April 2026 di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Informan penelitian berjumlah 11 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dalam proses perencanaan, penggunaan sistem, pengelolaan program, dan pemanfaatan output perencanaan, Informan terdiri atas 8 operator perencanaan (Dinkes dan UPT), 1 Kasubag Program, 1 Kasie Penyakit Tidak Menular, dan 1 Bendahara Dinas Kesehatan. Operator dipilih karena terlibat langsung dalam proses input, pengelolaan, dan penyesuaian data pada e-Planning Sulsel dan SIPD. Kasubag Program dipilih karena memiliki keterlibatan dalam pengelolaan perencanaan, sedangkan Kasie Penyakit Tidak Menular dan Bendahara.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman penggunaan sistem, manfaat, kemudahan penggunaan, kesesuaian sistem, kompleksitas, serta pemanfaatan output perencanaan. Observasi dilakukan terhadap proses penggunaan aplikasi dan dokumen perencanaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi melalui dokumen seperti DPA, Renja, dan dokumen perencanaan terkait

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan

secara deskriptif berdasarkan indikator TAM dan DOI. Kesimpulan ditarik setelah dilakukan pemeriksaan dan perbandingan terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang memiliki peran berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL

Karakteristik Informan

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode Informan	Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir	Umur	Lama Bekerja	Pengalaman Menggunakan Sistem
INF1	Kasubbag Program	S2 Pendidikan	35	10	Berpengalaman
INF2	Kasie Penyakit Tidak menular	S2 Kesmas	50	15	Tidak berpengalaman
INF3	Bendahara	S1 Ekonomi	50	18	Tidak Berpengalaman
INF4	Operator Perencana RSKD Dadi	S1 Kesmas	34	6	Berpengalaman
INF5	Operetor Perencana RSIA Fatimah	S1 Kesmas	34	6	Berpengalaman
INF6	Operator Perencana Labyankes	S1 Kesmas	44	15	Berpengalaman
INF7	Operator Unit Transfusi Darah	S1 Kesmas	40	13	Berpengalaman
INF8	Operator Perencana RS Haji	S1 Kesmas	47	14	Berpengalaman
INF9	Operator Perencana Dinkes	S1 Teknik Elektro	53	18	Berpengalaman
INF10	Operator Perencana Dinkes	S1 Manajemen	41	10	Berpengalaman
INF11	Operator Perencana UPT RSKD Gigi dan Mulut	S1 Kesmas	50	18	Berpengalaman

Sumber: Data Primer, 2026

Informan berusia 34–53 tahun dengan lama bekerja antara 6–18 tahun. Latar belakang pendidikan informan terdiri atas jenjang S1 dan S2. Sebagian besar informan merupakan pengguna langsung sistem dalam proses penginputan dan pengelolaan data perencanaan. INF2

dan INF3 memiliki keterlibatan sebagai penerima dan pengguna output perencanaan berupa DPA.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses perencanaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih melibatkan dua platform, yaitu e-Planning Sulsel dan SIPD. Operator menggunakan e-Planning Sulsel dalam proses kerja perencanaan dan selanjutnya melakukan input atau penyesuaian data pada SIPD.

“Di input 2 kali di e-Planning dan SIPD.” (INF6, wawancara, Maret 2026)

*“Aplikasi e-Planning sebagai kertas kerja, kemudian di input di SIPD.”
(INF10, wawancara, Maret 2026)*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem digunakan secara paralel dan data perlu disesuaikan pada masing-masing sistem.

Persepsi Kegunaan (*perceived usefulness*)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem memberikan manfaat dalam pengolahan data, perubahan atau penyesuaian anggaran, akses informasi antarperangkat daerah, serta penginputan rincian belanja.

*“Lebih memudahkan orang perencanaan mengolah datanya walaupun di tempat kerja masing-masing bisa terhubung misalnya dengan OPD lain seperti Bappeda.”
(INF7, wawancara, Februari 2026)*

*“Kalau transparansi sangat transparan karena bisa diakses oleh beberapa OPD, kalau misalnya Dinkes dapat melihat Rencana Kerja Belanja (RKB), bisa melihat langsung hasil inputan UPT, Bappeda sebagai induk perencanaan sudah bisa langsung melihat, jadi sangat transparan.”
(INF11, wawancara, Maret 2026)*

Informan juga menyampaikan manfaat sistem ketika terjadi perubahan atau penyesuaian anggaran.

“Saat terdapat perubahan atau penyesuaian anggaran, SIPD sangat membantu karena perubahan dapat dilakukan langsung dalam sistem dan hasilnya dapat segera terlihat pada program dan kegiatan yang mengalami perubahan.” (INF7, wawancara, Februari 2026)

“Memudahkan proses penginputan rincian belanja sesuai dengan SSH, mengantisipasi kesalahan penganggaran dengan melebihi dari harga SSH.” (INF4, wawancara, Maret 2026)

Persepsi Kemudahan (*perceived ease of use*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan dapat mempelajari penggunaan sistem melalui instruksi dan modul yang diberikan.

“Sejauh ini cukup tutorial saja, untuk penginputan kita diberi instruksikan sekaligus modul, jadi kesannya tidak perlu ji ada satu hari khusus kita diberikan pelatihan dalam satu ruangan, ini artinya juga menggambarkan bahwa SIPD cukup mudah dipelajari.” (INF8, wawancara, Februari 2026)

Namun, penggunaan dua sistem tetap menimbulkan pekerjaan tambahan.

“Di input 2 kali di e-Planning dan SIPD.” (INF6, wawancara, Maret 2026)

*“Aplikasi e-Planning sebagai kertas kerja, kemudian di input di SIPD.”
(INF10, wawancara, Maret 2026)*

Keunggulan Relatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem elektronik memiliki keunggulan dibandingkan proses manual terutama dari sisi waktu penyelesaian pekerjaan, koordinasi, dan pengurangan kesalahan penginputan.

“Sistem elektronik lebih unggul dibandingkan dengan manual, pada waktu sistem manual penginputan dilaksanakan 3–4 hari baru selesai tapi dengan sistem elektronik lebih cepat, bahkan 1 hari bisa selesai, sistem elektronik juga mengurangi sedikit kesalahan (penginputan dan rekapitulasi anggaran) dibanding manual.” (INF5, wawancara, Maret 2026)

Informan juga menjelaskan bahwa e-Planning dan SIPD masih memiliki fungsi yang saling melengkapi.

“Karena ada beberapa fitur di SIPD sulit didetailkan, maka penjabarannya ada di e-Planning.” (INF1, wawancara, Maret 2026)

“Ada beberapa pilihan cetak di SIPD yang tidak bisa diexcelkan, maka di e-Planning bisa diexcelkan.” (INF10, wawancara, Maret 2026)

Kesesuaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan sesuai dengan kebijakan dan regulasi perencanaan yang berlaku.

“SIPD sudah selaras dengan kebijakan dan regulasi perencanaan yang berlaku karena sistem ini dikembangkan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan proses perencanaan.” (INF1, wawancara, Maret 2026)

Namun, masih terdapat kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan proses kerja.

“Masih ada beberapa yang belum sesuai yaitu sinkronisasi SHS sesuai tahun anggaran.” (INF4, wawancara, Maret 2026)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan dua aplikasi yang belum terintegrasi menjadi bagian dari persoalan kesesuaian sistem dengan proses kerja.

Kompleksitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas terutama berkaitan dengan penginputan data pada dua aplikasi, perbedaan waktu penggunaan, dan kendala akses jaringan.

“Menginput dua kali kegiatan dalam waktu dan aplikasi berbeda kemungkinan ada kesalahan walaupun mungkin minim.” (INF11, wawancara, Maret 2026)

“Perlu dilakukan penginputan dua kali dan mempengaruhi beban kerja.” (INF8, wawancara, Maret 2026)

Informan juga menjelaskan kendala jaringan dalam penggunaan SIPD.

“Aplikasi semakin hari semakin mudah, dan semakin disederhanakan, kendalanya satuji yang klasik jaringan, aplikasi SIPD itu jaringan yang susah diakses, sering down.” (INF7, wawancara, Februari 2026)

Kemudahan diamati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa output dari proses perencanaan dapat diamati dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak melakukan penginputan secara langsung. Salah satu output tersebut adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Outputnya biasanya dalam bentuk DPA dan kami mudah membaca dan memahami uraian yang ada dalam DPA. Bagian perencanaan setiap setelah pengesahan DPA mereka memberikan satu ke bagian keuangan yang dijadikan dasar pembayaran oleh bendahara terhadap SPJ yang masuk ke bagian keuangan.” (INF3, wawancara, 10 Maret 2026)

“DPA selama ini sudah sangat baik dan sangat mudah dipahami, karena sudah lama digunakan dan tidak jauh beda ji dari sebelumnya, hanya saja anggaran yang saat ini terbatas.” (INF2, wawancara, 17 Februari 2026)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPA dapat dibaca dan dipahami oleh pihak yang menerima output perencanaan serta dimanfaatkan dalam proses kerja berikutnya.

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Perencanaan Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem perencanaan elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan manfaat dalam proses perencanaan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan integrasi proses. e-Planning Sulsel dan SIPD masih digunakan secara paralel sehingga operator perlu melakukan input atau penyesuaian data pada kedua sistem. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara digitalisasi dan interoperabilitas. Digitalisasi menunjukkan bahwa proses kerja telah menggunakan teknologi, sedangkan interoperabilitas menuntut agar sistem dapat saling bertukar data dan mendukung proses kerja secara terpadu.

Interoperabilitas merupakan elemen penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari desain layanan digital (Campmas et al., 2022). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan (Jamaluddin & Kholid Alfirdaus, 2024) yang menemukan bahwa penerapan e-Planning di Provinsi DIY memberikan manfaat dalam menjaga konsistensi perencanaan dan mempercepat proses, tetapi integrasi antara JogjaPlan dan SIPD belum maksimal. (Margariti et al., 2024) juga menegaskan bahwa interoperabilitas organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Integrasi membutuhkan keterpaduan antara sistem, organisasi, informasi, dan proses kerja. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun pengguna mampu menjalankan masing-masing aplikasi, pekerjaan ganda tetap terjadi ketika kedua aplikasi belum terhubung secara optimal. Fenomena penggunaan dua sistem secara paralel bukan hanya persoalan teknis aplikasi, tetapi menunjukkan adanya persoalan pada hubungan antara sistem dan proses kerja.

Persepsi Kegunaan

Pengguna menilai sistem bermanfaat dalam pengolahan data, perubahan anggaran, koordinasi, akses informasi, dan penyusunan dokumen. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan secara langsung dalam pekerjaan pengguna. Dalam perspektif TAM, *perceived usefulness* menunjukkan sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persepsi kegunaan pada tingkat aplikasi belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi pada tingkat proses organisasi. Pengguna merasakan manfaat masing-masing sistem, tetapi harus melakukan input kembali ketika berpindah dari e-Planning Sulsel ke SIPD. Sistem dipersepsikan berguna, tetapi proses organisasi secara keseluruhan belum sepenuhnya efisien. *Perceived usefulness* dan *perceived ease of use* merupakan faktor penting

dalam penerimaan sistem e-government (Al-Rahmi et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020) yang membedakan keberhasilan pemerintahan digital antara aspek implementasi dan adopsi. Keberhasilan teknologi tidak cukup dilihat dari penerimaan pengguna, tetapi juga dari bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan dalam organisasi.

Persepsi Kemudahan Penggunaan

Informan menyatakan bahwa SIPD relatif mudah dipelajari melalui tutorial, instruksi, dan modul. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kemudahan menggunakan aplikasi tidak sama dengan kemudahan menjalankan keseluruhan proses kerja. Pengguna dapat memahami cara menggunakan aplikasi, tetapi tetap mengalami pekerjaan tambahan karena harus memasukkan data pada dua sistem. Hambatan implementasi bukan terutama disebabkan oleh ketidakmampuan pengguna memahami aplikasi. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian (Al-Rahmi et al., 2022) yang menunjukkan pentingnya *perceived ease of use* dalam penerimaan e-government. Penelitian (Warsono et al., 2023) juga menunjukkan relevansi konstruk TAM dalam memahami penerimaan teknologi pada administrasi publik di Indonesia. Permasalahan lebih tepat dipahami sebagai persoalan desain proses dan integrasi sistem daripada persoalan kemampuan pengguna.

Keunggulan Relatif

Sistem elektronik dinilai lebih unggul dibandingkan proses manual karena mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mengurangi kesalahan penginputan serta rekapitulasi. Namun, keunggulan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pekerjaan ganda. Sistem dapat mempercepat pekerjaan pada satu tahapan, tetapi manfaat tersebut berkurang apabila data harus dimasukkan kembali pada sistem lain. Temuan ini menunjukkan adanya *relative advantage* sebagaimana dijelaskan dalam perspektif *Diffusion of Innovation* yang memperlihatkan bahwa *relative advantage* perlu dilihat pada keseluruhan alur proses, bukan hanya pada keunggulan fitur masing-masing aplikasi.

Temuan (De Vries et al., 2018) melalui penelitian meta-sintesis inovasi sektor publik menunjukkan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, organisasi, dan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, manfaat waktu dan kemudahan pengolahan data menjadi alasan pengguna merasakan keunggulan sistem elektronik dibandingkan proses manual.

Kesesuaian

Pada aspek *compatibility*, SIPD telah sesuai dengan kebijakan dan regulasi perencanaan pemerintah daerah. Namun, kesesuaian regulasi tersebut belum sepenuhnya sama dengan kesesuaian terhadap kebutuhan operasional pengguna. Hal ini terlihat dari masih digunakannya e-Planning Sulsel sebagai bagian dari proses kerja sebelum data dimasukkan ke SIPD. Dengan demikian, terdapat kesesuaian secara regulatif tetapi belum sepenuhnya sesuai secara operasional.

Digitalisasi sektor publik merupakan proses organisasi yang kompleks karena teknologi berinteraksi dengan struktur organisasi, proses kerja, kepentingan, dan tata kelola. (Plesner et al., 2018) menjelaskan bahwa digitalisasi dalam organisasi sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga membawa perubahan terhadap cara kerja, praktik organisasi, serta hubungan antara teknologi dan pengguna dalam menjalankan pekerjaan.

Dengan demikian, kesesuaian sistem tidak cukup dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan regulasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem dalam mendukung proses kerja aktual pengguna. Dalam konteks implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik, sistem yang sesuai seharusnya mampu mendukung tahapan perencanaan, memudahkan pekerjaan pengguna, mengurangi pekerjaan berulang, serta mendukung keterpaduan proses dan data antarplatform.

Kompleksitas

Kompleksitas menjadi salah satu temuan utama penelitian. Penginputan data pada dua sistem menyebabkan pekerjaan menjadi lebih panjang dan meningkatkan kemungkinan kesalahan. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa kompleksitas bukan hanya berasal dari antarmuka aplikasi. Kompleksitas muncul karena dua aplikasi digunakan dalam satu rangkaian proses yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Penelitian mengenai e-Planning di Kabupaten Demak juga menunjukkan bahwa implementasi sistem elektronik menghadapi persoalan teknis, kapasitas jaringan, dan kemampuan pengelolaan sistem (Maharani & Manar, 2020). Sementara itu, penelitian (Triwahyuni & Fatmawati, 2024b) menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi SIPD pada proses administrasi pemerintahan. Pada penelitian ini kompleksitas utama tidak hanya berasal dari kendala jaringan, tetapi juga dari pengulangan input akibat penggunaan dua platform. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kompleksitas perlu diarahkan pada integrasi proses dan data, bukan hanya peningkatan kemampuan pengguna.

Kemudahan Diamati

Hasil penelitian menunjukkan bahwa output perencanaan dapat diamati, dipahami, dan digunakan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam penginputan. Hal tersebut terlihat dari DPA yang diterima oleh bagian keuangan dan digunakan sebagai dasar dalam proses berikutnya. INF2 dan INF3 memberikan perspektif penting karena keduanya tidak ditempatkan sebagai operator aplikasi. INF2 memberikan informasi mengenai keterpahaman DPA, sedangkan INF3 menjelaskan pemanfaatan DPA dalam proses keuangan.

Perspektif Diffusion of Innovation, *observability* menunjukkan sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat oleh pihak lain. Dalam konteks digitalisasi sektor publik, penerapan teknologi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sistem oleh operator, tetapi juga dengan bagaimana hasil teknologi tersebut memengaruhi dan mendukung praktik kerja dalam organisasi (Plesner et al., 2018). Pada penelitian ini hasil sistem tidak dinilai berdasarkan kemampuan INF2 dan INF3 mereka melihat, memahami, dan memanfaatkan output yang dihasilkan. DPA menjadi bukti bahwa hasil implementasi sistem dapat diamati dan dimanfaatkan pada tahapan kerja berikutnya dan menjadi acuan bahwa manfaat digitalisasi tidak berhenti pada operator, tetapi dapat diteruskan kepada pihak lain dalam rantai proses organisasi.

Integrasi Data Perencanaan

Temuan utama penelitian adalah belum optimalnya integrasi antara e-Planning Sulsel dan SIPD. Pengguna tetap memandang sistem bermanfaat dan relatif mudah digunakan, tetapi harus melakukan input atau penyesuaian data pada kedua platform. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara digitalisasi dan interoperabilitas. Sistem telah digunakan secara elektronik, tetapi belum sepenuhnya mendukung prinsip *once-only*, yaitu data yang telah tersedia dapat digunakan kembali tanpa penginputan berulang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai interoperabilitas pemerintahan daerah di Indonesia (Mutiarin et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pemerintah daerah membutuhkan tata kelola interoperabilitas agar sistem yang digunakan tidak berkembang menjadi sistem yang terfragmentasi.

Interoperabilitas perlu menjadi bagian utama dalam desain layanan digital pemerintah karena dapat mendukung keterhubungan antaradministrasi Hasil (Campmas et al., 2022). OECD (2024) juga menempatkan mekanisme pertukaran data sebagai komponen penting untuk menciptakan layanan pemerintah yang lebih terhubung dan mengurangi beban administrasi. Masalah yang ditemukan bukan menunjukkan bahwa pengguna menolak teknologi. Sebaliknya, pengguna menerima dan merasakan manfaat teknologi, tetapi desain hubungan antarsistem belum mendukung integrasi proses secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan manfaat dalam pengolahan data, penyusunan dokumen, koordinasi, akses informasi, dan percepatan pekerjaan dibandingkan proses manual. Pengguna juga menilai sistem relatif mudah dipelajari dan digunakan. Dari perspektif *Diffusion of Innovation*, sistem memiliki keunggulan relatif, sesuai dengan kebutuhan regulatif, serta menghasilkan output berupa DPA yang dapat diamati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat dalam proses keuangan. Namun, implementasi belum optimal karena e-Planning Sulsel dan SIPD masih digunakan secara paralel sehingga terjadi penginputan dan penyesuaian data secara berulang yang meningkatkan beban kerja dan kompleksitas proses. Oleh karena itu, persoalan utama implementasi bukan terletak pada rendahnya penerimaan pengguna terhadap teknologi, tetapi pada belum optimalnya integrasi sistem dan proses bisnis.

Di sarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak terkait untuk memperkuat interoperabilitas e-Planning Sulsel dan SIPD melalui penyelarasan struktur data, proses bisnis, dan mekanisme pertukaran data sehingga data yang telah dimasukkan dapat dimanfaatkan kembali tanpa penginputan berulang. Dinas Kesehatan juga perlu mempertahankan dukungan teknis bagi operator sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada perangkat daerah atau pemerintah daerah lain serta mengkaji secara lebih terukur dampak integrasi sistem terhadap efisiensi waktu, beban kerja, kualitas data, dan efektivitas proses perencanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik STIA LAN Makassar atas dukungan akademik selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data, informasi, dan pengalaman selama proses wawancara. Penghargaan diberikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta bantuan teknis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rahmi, W. M., Uddin, M., Alkhalaf, S., Al-Dhlan, K. A., Cifuentes-Faura, J., Al-Rahmi, A. M., & Al-Adwan, A. S. (2022). Validation of an Integrated IS Success Model in the Study of E-Government. *Mobile Information Systems*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/8909724>
- Berbasis, P., Spbe, E., & Pemerintah, P. (2022). *Hambatan-Hambatan Dalam Implemetasi Layanan Sistem Obstacles in Implementation of Electronic-Based Government System (SPBE) Services in Local Governments*. 5(3), 215–223. <https://doi.org/10.33387/jiko>
- Campmas, A., Iacob, N., & Simonelli, F. (2022). How can interoperability stimulate the use of digital public services? An analysis of national interoperability frameworks and e-Government in the European Union. *Data and Policy*, 4(1). <https://doi.org/10.1017/dap.2022.11>
- Cita, D., Robert, S., Siregar, T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Pandapotan, H., Heldy, S., Alam, V., Zaenal, A., Falimu, A., & Rahmat, A. (2020). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN*.
- De Vries, H., Tummers, L., & Bekkers, V. (2018). *The diffusion and adoption of public sector innovations: A meta-synthesis of the literature*.
- Dwi Maharani, D., & Ghulam Manar, D. (2020). *Penerapan E-Planning sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak*.
- Gilang Arrauf Adhidarma, M., Ari Nursanto, G., & Susaningsih, C. (2025). Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dan Difussion Of Inovation (DOI) Pada Analisis Penggunaan Sistem Autogate : Systematic Literature Review. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Number 4). <https://doi.org/10.36040/jati.v9i4.13882>
- Gil-Garcia, J. R., & Flores-Zúñiga, M. (2020). Towards a comprehensive understanding of digital government success: Integrating implementation and adoption factors. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101518. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2020.101518>
- Jamaluddin, S., & Kholid Alfirdaus, L. (2022). *Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning Di Bappeda Provinsi DIY*.
- Margariti, V., Stamati, T., Anagnostopoulos, D., & Nikolaidou, M. (2024). *Assessing the Organizational Interoperability of the National Single Digital Gateway (GOV.GR)*. <https://hdl.handle.net/10125/106647>
- Marlindawati, M., Pramudho, P. A. K., & Andarini, S. Y. (2026). INTEGRASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI TAHUN 2025. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8222>
- Maulidatul Hasanah, M. D. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei, 2025(C), 156–164.
- Mutiarin, D., Lawelai, H., Sadat, A., Nastia, Wijaya, A. A. M., & Sa'ban, L. M. A. (2024). Interoperability Governance: An Analysis of the Impact of Digitization of Public Services on Local Government. *Journal of Local Government Issues*, 7(2), 111–128. <https://doi.org/10.22219/logos.v7i2.30388>
- Pada, S., Transmigrasi, D., & Tenaga, D. A. N. (2021). *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Application In The Transmigration And Manpower Sistem data di masa globalisasi dikala ini tumbuh sangat pesat dengan Teknologi Komputer yang terus menjadi mutahir dalam waktu yang relatif*. 1(1), 146–161.

- Plesner, U., Justesen, L., & Glerup, C. (2018). The transformation of work in digitized public sector organizations. *Journal of Organizational Change Management*, 31(5), 1176–1190. <https://doi.org/10.1108/JOCM-06-2017-0257>
- Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024a). Analysis Of Challenges And Obstacles In The Implementation Of The Republic Of Indonesia Regional Government Information System (SIPD RI) For Financial Administration In The Department Of Human Rights, Spatial Planning And Land Affairs Of Kotawaringin Timur Regency. *Nusantara Hasana Journal*, 4(5), Page.
- Warsono, H., Yuwono, T., & Putranti, I. R. (2023). Analyzing technology acceptance model for collaborative governance in public administration: Empirical evidence of digital governance and perceived ease of use. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 41–48. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.008>
- Wibowo, D. (2023). *Tantangan Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Berdasarkan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Pendekatan Transformasi Sistem Kesehatan*. 82–88.
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah*. 5, 2154–2164. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>